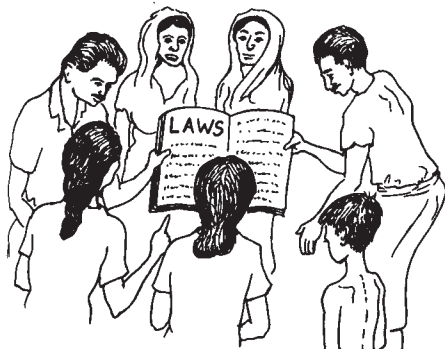


## Apendiks B: Menggunakan Hukum untuk Memperjuangkan Hak atas Lingkungan



Di banyak negara, hak asasi manusia, dan kadang-kadang lingkungan (hak atas lingkungan yang aman dan sehat) dilindungi undang-undang. Buku ini merangkum banyak cerita tentang bagaimana masyarakat bekerja bersama-sama membuat undang-undang baru untuk melindungi komunitas mereka, atau menuntut perlindungan berdasarkan hukum yang sudah ada.

Bagian ini merangkum informasi tentang bagaimana memanfaatkan **Analisis Dampak Lingkungan/AMDAL** (*Environmental Impact Assessment*) atau tuntutan hukum untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan Anda. Bagian ini juga memuat informasi tentang ke mana Anda bisa mendapatkan bantuan internasional jika pengadilan, lokal dan nasional, dan pemerintah di negara Anda tidak memberikan perlindungan.

Komunitas-komunitas yang berjuang untuk melindungi lingkungan dan kesehatan mereka seringkali mendapat perlawanan dan tindakan kekerasan dari perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah yang ingin mengeruk sumberdaya alam mereka atau menjalankan proyek-proyek pembangunan, dengan mengabaikan dampak buruknya. Proyek-proyek semacam ini akan mengusir orang-orang dari tanah-tanah mereka, menciptakan polusi yang sangat buruk, mengancam keselamatan masyarakat, atau menghasilkan racun-racun yang mendatangkan masalah kesehatan serius. Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia dan hak-hak atas lingkungan.

Terkadang, perusahaan-perusahaan besar punya begitu banyak uang dan kekuasaan sehingga mampu mencegah pemerintah untuk mengakui dan menegakkan undang-undang yang seharusnya memberikan perlindungan. Ketika hukum/perundang-undangan di tingkat lokal dan nasional tidak efektif, ada hukum internasional yang bisa memberikan perlindungan bagi Anda dan komunitas Anda.

Gagasan setiap orang memiliki hak atas lingkungan merupakan ranah hukum yang relatif baru, sehingga definisi tentang hak-hak lingkungan dan bagaimana hak-hak tersebut diterapkan masih terus diperjuangkan. Hal ini membuat setiap perjuangan hukum untuk mendapatkan hak atas lingkungan menjadi penting.

## Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Karena proyek-proyek industri dan pembangunan mengakibatkan kerusakan lingkungan, banyak pemerintahan, industri, dan lembaga-lembaga pembangunan dituntut oleh hukum untuk menggunakan piranti pengambilan keputusan dan perencanaan yang dinamakan analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Sebuah AMDAL menjelaskan bagaimana sebuah proyek, seperti pembangunan jalan raya, pertambangan, bandar udara, atau pengembangan industrial lain bisa mempengaruhi manusia, binatang, tumbuhan, tanah, air, dan kualitas udara di suatu kawasan. Ini bisa juga dilihat pada masalah-masalah sosial, seperti penggusuran warga dan hilangnya sumberdaya kultural, seperti mata pencaharian tradisional, tempat-tempat bersejarah atau yang bermakna spiritual, dsb. Sebuah AMDAL juga harus mendorong cara-cara pelaksanaan pekerjaan yang lebih sedikit menimbulkan kerugian, jika sebuah proyek diijinkan beroperasi.

AMDAL bisa dikerjakan oleh perusahaan itu sendiri, atau bisa juga dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama komunitas dan kalangan pemerintahan. (Untuk mengetahui cerita tentang komunitas yang menggunakan AMDAL, lihat halaman 561.)

### Bagaimana AMDAL bekerja

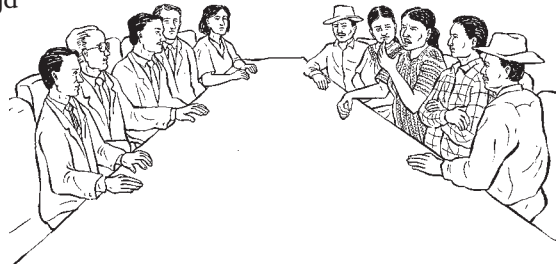
AMDAL mencakup 2 aktivitas:

1. Kajian dampak lingkungan dari proyek dan sebuah laporan tertulis yang menjelaskan dampak-dampak tersebut. Biasanya ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang mengelola proyek dan bisa melibatkan atau tidak melibatkan partisipasi komunitas.
2. Pertemuan-pertemuan publik yang memungkinkan komunitas terkena dampak mengevaluasi proyek sebelum proyek mulai berjalan.

AMDAL akan berjalan baik ketika ia dipandu oleh prinsip-prinsip kewaspadaan (lihat halaman 32). Jika sebuah AMDAL menunjukkan kemungkinan adanya dampak merugikan dari proyek, maka rencana tersebut harus dihentikan atau diubah. Tetapi, biasanya AMDAL digunakan untuk membuat sebuah proyek kelihatan tidak menimbulkan dampak buruk padahal proyek tersebut justru mendatangkan kerugian serius pada masyarakat dan lingkungan, baik sekarang mau pun di masa yang akan datang.

Banyak perusahaan membuat laporan AMDAL sebelum mengajak partisipasi komunitas, bukan menulisnya dengan partisipasi komunitas. Terkadang, perusahaan tidak mempublikasikan pertemuan-pertemuan menyangkut AMDAL atau menyelenggarakan pertemuan yang sulit dihadiri warga. Ketika proses AMDAL yang tidak jujur dibuat dengan cepat oleh perusahaan atau lembaga-lembaga

pemerintah, biasanya hal ini akan mendatangkan situasi di mana proyek terus berjalan di tengah-tengah upaya komunitas untuk menghentikannya. Namun demikian, AMDAL bisa menjadi piranti yang penting bagi komunitas dan pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki proyek pembangunan yang diusulkan.



## Bagaimana komunitas dapat mempengaruhi sebuah AMDAL

Mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber (bukan hanya dari perusahaan) dan menyisihkan waktu yang Anda perlukan untuk memahami semua dampak yang mungkin timbul, merupakan bagian penting dari upaya mendapatkan hak Anda untuk berpartisipasi dalam sebuah AMDAL. Biasanya, banyak keputusan telah diambil sebelum orang-orang yang paling terkena dampak berbicara sedikitpun.

Berpartisipasi dalam proses AMDAL dapat membantu mendidik dan mengorganisasi komunitas Anda untuk dalam jangka panjang melindungi kesehatan dan sumberdayanya dengan lebih baik. Meski tidak selalu berhasil menghentikan proyek yang mendatangkan kerusakan, namun memberikan pendidikan dan mengorganisasi diri menyangkut AMDAL dapat membantu melindungi komunitas Anda.



### Tuntutan untuk berpartisipasi

Komunitas bisa menuntut sebuah suara dalam AMDAL. Terkadang, pengadilan, pemerintah, atau lembaga-lembaga pembangunan mengizinkan perwakilan komunitas mengambil bagian dalam proses AMDAL. Orang-orang dari komunitas boleh berpartisipasi, atau dapat minta pendamping, seperti LSM atau pengacara, untuk mewakili mereka. Jika perwakilan komunitas mengambil bagian dalam proses AMDAL, maka mereka dapat melaporkan kembali pada pertemuan komunitas tentang apa yang direncanakan dan dilakukan perusahaan. Partisipasi juga dapat membantu membangun pemahaman tentang hak dan tanggung jawab komunitas, dan cara-cara mencegah munculnya kerugian dari proyek atau menghentikan proyek sama sekali.

### Dapatkan laporan AMDAL secara lengkap

Komunitas mempunyai hak untuk mengetahui keseluruhan dokumen AMDAL, bukan hanya versi ringkasnya saja. Laporan AMDAL biasanya memuat bagian yang dinamakan “Risiko Keamanan,” “Risiko Sosial,” Risiko Kesehatan,” dan “Biaya Pembersihan.” Bagian-bagian ini bisa menjelaskan masalah-masalah yang perusahaan tidak ingin membaginya, terutama dalam pertemuan-pertemuan dengan publik.

Masalah-masalah yang dijelaskan dalam sebuah AMDAL, juga problem-problem yang diabaikan oleh AMDAL tersebut, bisa disebarkan kepada media, pejabat-pejabat pemerintah, dan publik untuk membangun perlawanan yang lebih luas terhadap proyek-proyek yang menimbulkan kerugian. Anda bisa juga membaginya dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional, seperti PBB, yang mungkin bisa mendatangkan tekanan pada perusahaan dan pemerintah untuk menanggapi keprihatinan komunitas.

## Komunitas menentang pertambangan

Komunitas petani kecil di Junín hidup di kawasan hutan lebat yang indah di lereng Gunung Andes Meksiko. Warganya miskin tetapi mereka bisa hidup dari bumi selama ratusan tahun. Belakangan, warga Junín menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah mereka: sebuah perusahaan berencana membangun salah satu tambang tembaga sumur terbuka (*open pit*) terbesar di kawasan Amerika Selatan.

Ketika sebuah perusahaan Jepang datang untuk mengeksplorasi kawasan tersebut, orang-orang di Junín paham bahwa pertambangan bisa mendatangkan polusi. Tetapi, perusahaan tambang tersebut berjanji akan membangun jalan raya, klinik kesehatan, dan sekolah-sekolah, sehingga akhirnya warga Junín pun membiarkan perusahaan tersebut mengeksplorasi mineral. Tidak butuh waktu lama, perusahaan menemukan cadangan tembaga yang sangat besar, dan warga Junín segera merasakan kalau pasokan air mereka tercemar limbah tambang. Orang-orang pun mulai mengalami gangguan kulit dan masalah kesehatan lainnya.

Komunitas meminta perusahaan tambang untuk menghentikan polusinya. Perusahaan tidak bersedia, sehingga warga Junín pun mengambil tindakan. Ketika pegawai-pegawai tambang pergi untuk berlibur, ratusan warga desa masuk ke kompleks tambang, membuang berbagai perkakas, mebel, dan benda-benda berharga lain, dan menyerahkannya pada pihak-pihak yang berwenang. Kemudian mereka membakar kompleks tersebut. Perusahaan memahami pesan yang disampaikan dan bersedia mundur, tetapi kemudian menjual tambang tersebut kepada perusahaan Kanada.

Perusahaan Kanada tersebut mulai memecah belah komunitas. Mereka menawarkan uang besar pada warga Junín agar bersedia menjual tanah-tanah mereka. Sebagian warga benar-benar menjual tanahnya, tetapi sebagian lainnya menolak. Perusahaan tahu bahwa tindakan ini akan melahirkan konflik. Perusahaan juga mengirim seorang dokter untuk melayani masyarakat, tetapi pelayanan kesehatan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menandatangani lembar kertas yang menyatakan mereka memihak tambang. Setelah ketidakadilan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat di luar Ekuador, para pendukung dari masyarakat internasional pun segera mengirim seorang pekerja kesehatan untuk melayani setiap orang yang sakit.

Karena hukum di Ekuador mengharuskan adanya laporan AMDAL sebelum pembangunan suatu proyek dapat dimulai, masyarakat Junín pun memasukkan AMDAL sebagai bagian dari rencana mereka untuk melindungi tanah-tanah mereka. Warga desa tahu bahwa jika AMDAL tidak dipersiapkan dengan sempurna, pemerintah tidak akan mengizinkan tambang tersebut dibangun. Warga juga mengetahui bahwa sebuah AMDAL yang jujur pasti akan menunjukkan bagaimana tambang tembaga akan memaksa warga pindah, menyebabkan polusi udara, erosi, dan timbunan lumpur di sungai-sungai dan jalan air lain, dan mencemari air dengan limbah kasar, logam berat, dan limbah beracun lain.

*Kami terus mengorganisasi diri. Sebagian warga desa mulai menerbitkan koran untuk menyebarkan berita dan membangun dukungan untuk perjuangan mereka.*



(kisah bersambung ke halaman berikutnya)

(bersambung dari halaman sebelumnya)

Warga Junin belajar memanfaatkan hukum untuk keuntungan mereka. Setelah perusahaan mengklaim telah melakukan AMDAL, pemerintah pun menolaknya karena tidak lengkap.

Masyarakat Junin juga memanfaatkan tindakan-tindakan langsung, seperti menolak membiarkan perusahaan masuk ke dalam kawasan dengan cara memblokade jalan. Para pemuka komunitas mendeklarasikan seluruh kawasan merupakan zona terlarang untuk pertambangan. Dengan memanfaatkan beragam taktik, warga Junin berhasil mencegah tambang tembaga *open pit* menghancurkan rumah-rumah mereka, hutan-hutan yang kaya, dan sumber air mereka.



## AMDAL berbasis komunitas

AMDAL berbasis komunitas dapat membantu masyarakat di sebuah desa, kota kecil, atau suatu kawasan untuk mencapai pemahaman bersama tentang cara-cara yang mereka pakai, tentang bagaimana melindungi dan bergantung pada sumberdaya seperti udara, makanan, binatang, produk-produk hutan, obat-obatan herbal, tempat-tempat sakral, dan sebagainya. Hal ini akan menciptakan sebuah proses yang dapat menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan di dalam komunitas menyangkut penggunaan sumberdaya. Hal ini juga membantu membangun kesatuan yang dibutuhkan untuk menghadapi perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah. Di sisi lain, hal ini juga membantu menggerakkan masyarakat untuk menentang industri-industri yang mengambil keuntungan atas terpecah-pecahnya masyarakat untuk mengeruk air, kayu, lahan, atau sumberdaya lain mereka.

AMDAL berbasis komunitas dapat berupa sekadar mendiskusikan sumberdaya apa yang dimanfaatkan komunitas dan membuat kesepakatan tentang bagaimana memberikan perlindungan sebaik-baiknya pada sumberdaya tersebut dari ancaman eksploitasi. AMDAL berbasis komunitas juga bisa rumit, mencakup aktivitas-aktivitas seperti membuat peta yang rinci, mengadakan survei, membangun persekutuan dengan komunitas sekitar dan organisasi-organisasi pendukung.

AMDAL berbasis komunitas berbeda dengan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah. Boleh jadi ia tidak memenuhi ketentuan hukum sebuah AMDAL “resmi” karena AMDAL berbasis komunitas lebih memberi makna pada hal-hal yang dipikirkan komunitas dan kesehatan masyarakat serta kultur mereka daripada mengeksploitasi sumberdaya. Sebuah AMDAL berbasis komunitas dilaksanakan dengan kesadaran bahwa sulitnya memahami struktur dan bahasa “ilmiah” dalam AMDAL bukan saja membuat sebagian besar masyarakat bingung, melainkan memang sengaja dibuat untuk menghindarkan keterlibatan komunitas. AMDAL berbasis komunitas merupakan salah satu cara untuk mengatakan bahwa “Cara lain untuk menganalisis dampak lingkungan sangat dimungkinkan.”

Banyak sekali aktivitas yang dimuat dalam buku ini, seperti pemetaan (halaman 15), drama sosial (halaman 18), survei kesehatan (halaman 500), aktivitas perlindungan DAS (halaman 164), menyusuri perjalanan sampah (halaman 391), dan aktivitas-aktivitas lain yang dikembangkan oleh komunitas. Anda dapat memberi kontribusi pada AMDAL berbasis komunitas.

## Langkah Hukum

Salah satu cara mendapatkan hak dan keadilan atas lingkungan adalah dengan pergi ke pengadilan untuk menuntut perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum negara dan internasional. Langkah hukum yang sukses terhadap industri atau perusahaan yang mencemari lingkungan tidak sekadar memberikan perlindungan pada komunitas yang langsung terkena dampak, melainkan juga melindungi masyarakat di tempat lain dan generasi mendatang.

### Apakah langkah hukum akan menolong komunitas Anda?

Langkah hukum telah dijalankan dengan sukses dalam banyak perjuangan menghadapi keadilan lingkungan. Tetapi, langkah ini sangat mahal dan seringkali memakan waktu bertahun-tahun.

Bahkan di negara-negara yang memiliki perundang-undangan yang melindungi kesehatan dan lingkungan, memenangkan sebuah tuntutan di pengadilan masih cukup sulit. Jika hukum jarang digunakan, hakim-hakim dan pengacara boleh jadi tidak akan memahami hukum atau perundang-undangan tersebut dengan baik. Dan di banyak negara, khususnya di mana perusahaan-perusahaan besar sangat berkuasa, korupsi di antara para hakim dan politisi membuat masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya. Sayangnya, ada begitu banyak tuntutan hukum yang gagal dibandingkan yang sukses.

Sebelum menempuh langkah hukum melawan perusahaan besar, industri, atau pemerintah, berikut ini adalah hal-hal yang patut dipertimbangkan.

#### Tetapkan tujuan Anda

Penting sekali mengetahui dengan tepat apa yang hendak Anda capai dengan langkah hukum tersebut. Selanjutnya, putuskan apakah langkah hukum merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Apakah Anda ingin agar perusahaan:

- membersihkan tumpahan minyak atau polusi beracun lainnya?
- memberi ganti rugi kepada masyarakat atas kerugian pada kesehatan, tanah, atau sumberdaya?
- menutup kegiatan perusahaan dan meninggalkan kawasan atau negara ini?

Pertempuran di ranah hukum dapat memobilisasi dan mendidik komunitas. Tetapi, tindakan-tindakan seperti pemboikotan, pendudukan, mogok kerja, atau kampanye melalui media massa, bisa membuat negosiasi atau penyelesaian politis berjalan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan langkah hukum melalui pengadilan. Pertimbangkan apakah langkah-langkah tersebut membuat penyelesaian lebih mudah dan lebih efektif bagi komunitas Anda dari pada langkah hukum. Pertimbangkan pula apakah menggunakan kedua langkah sekaligus akan membantu komunitas Anda memenangi pertempuran.



**Apakah langkah hukum ada manfaatnya meski bisa dipastikan akan kalah di pengadilan?**

Tentu saja Anda ingin menang di pengadilan. Tetapi, jika Anda tidak yakin bahwa tuntutan Anda akan menang, pertimbangkan dengan baik apakah tuntutan Anda akan membantu atau justru memperburuk persoalan jika tidak menang. Terkadang sebuah tuntutan hukum yang tidak sukses bisa menarik perhatian publik pada persoalan komunitas. Jika sebuah tuntutan yang melibatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia gagal di peradilan di negara Anda, Anda bisa mengajukan keberatan pada lembaga-lembaga internasional seperti *Inter-American Human Rights Commission* atau PBB (lihat halaman 567). Mungkin ini tidak menyelesaikan persoalan, tetapi ia bisa menarik banyak perhatian pada persoalan Anda; tetapi sekaligus juga memakan banyak waktu dan sumberdaya.

Terkadang, suatu tuntutan yang gagal bisa memperburuk keadaan. Hasil yang buruk dapat membuat hakim dan pengacara berpikir bahwa tuntutan-tuntutan di masa mendatang pasti juga tidak akan menang. Publisitas negatif dapat membuat orang berpikir bahwa komunitas hanya sekedar meminta uang dan imbalan lain tanpa dasar. Dan seperti langkah-langkah gagal lain, tuntutan yang gagal bisa memperlemah dan memecah-belah suatu komunitas.

**Siapa yang akan membawa tuntutan ke pengadilan?**

Korban yang menderita kerugian, apakah itu perseorangan, keluarganya, atau seluruh komunitas, harus rela berusaha dan mengambil risiko akibat suatu tuntutan hukum. Biasanya, suatu organisasi tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap suatu perusahaan atas nama seseorang yang menjadi korban tetapi tidak bersedia mengajukan tuntutan.

**Apakah ada bukti kerugian?**

Supaya tuntutan sukses, Anda harus mampu membuktikan:

- Korbannya mengalami penderitaan fisik atau kerugian ekonomi.
- Perusahaan menjadi penyebab atau bertanggung jawab atas terjadinya kerugian.

Jika tidak ada cukup bukti, tuntutan hukum akan membuat keadaan jauh lebih buruk daripada memperbaikinya. Bahkan, ketika sebuah perusahaan jelas-jelas melanggar hukum, tanpa adanya bukti yang menyebabkan kerugian, Anda tidak boleh membawanya ke pengadilan, dan jika Anda bersikukuh, Anda bisa kalah.

**Apakah buktinya tersedia?**

Hanya bukti yang bisa dibawa ke pengadilan sajalah yang akan berguna di pengadilan. Orang-orang yang mengajukan tuntutan karena mereka menderita kerugian harus bersedia dan mampu membuat pernyataan di pengadilan, dan mereka juga harus punya saksi-saksi yang bersedia membuat pernyataan. Mereka harus mampu menjelaskan melalui gambar-gambar, kajian, catatan medis, atau bukti lainnya bahwa kerugian yang mereka alami disebabkan oleh perusahaan yang mereka tuntut. Kerugian bisa sangat sulit dibuktikan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bisa membayar seorang dokter untuk menyatakan bahwa bukan bahan kimia yang dipakai perusahaan lah yang menyebabkan penyakit kanker di antara para pekerja, melainkan kebiasaan buruk para pekerja sendiri seperti merokok, mengkonsumsi makanan tak sehat, atau sekedar nasib sial. Bisa sangat sulit membuktikan secara hukum “penyebab dan pengaruh” meski pun terlihat jelas dengan akal sehat.

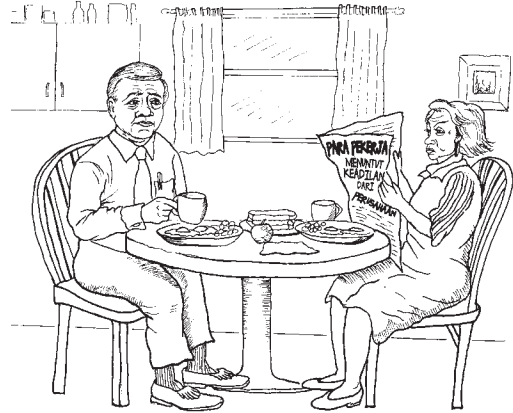
### Siapa atau apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan?

Tuntutan hukum bisa diajukan terhadap orang-orang, perusahaan, dan di banyak negara terhadap pemerintah karena mereka menimbulkan kerusakan lingkungan.

### Apakah tuntutan hukum tersebut dilakukan terhadap perusahaan internasional?

Perusahaan-perusahaan multinasional biasanya punya kantor di banyak negara. Agar tuntutan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional berhasil, perlu sekali bekerja di kedua negara, yakni di negara tempat terjadinya kerusakan dan di negara asal perusahaan multinasional tersebut (*home country*). Langkah ini akan makan biaya banyak sekaligus sulit, tetapi tetap bisa ditempuh (lihat cerita-cerita di halaman 494 dan 522).

Perusahaan-perusahaan multinasional seringkali mempunyai cabang di negara-negara di mana mereka beroperasi, yang disebut anak perusahaan. Akan lebih mudah mengambil langkah hukum terhadap anak-anak perusahaan daripada menuntut perusahaan induknya. Sebagai contoh, ketika perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Chevron, mencemari Delta Niger di Nigeria, bukannya menuntut perusahaan Amerika tersebut, para aktivis lokal justru menuntut anak perusahaan Chevron di Nigeria. Pada saat yang sama, aktivis-aktivis internasional meluncurkan sebuah kampanye untuk mendidik masyarakat di seluruh dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh Chevron, yang memberikan tekanan pada perusahaan tersebut untuk mengubah praktek-prakteknya.



### Hal-hal lain yang harus dipertimbangkan

- Apakah kerusakan dan pelanggaran terjadi hari-hari ini? Sebuah tuntutan hukum harus diajukan dalam kurun waktu tertentu setelah kerusakan terjadi (biasanya tidak lebih dari 10 tahun). Hal ini membuat sulitnya memenangi sebuah kasus tentang penyakit yang bisa makan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, seperti kanker, sungguh pun penyakit-penyakit semacam ini merupakan penyakit yang paling mendatangkan penderitaan.
- Apakah orang-orang yang mengajukan tuntutan, saksi-saksi, dan pengacara-pengacara mereka bersedia menanggung resiko atas keamanan mereka? Banyak perusahaan dan pemerintah akan menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka, termasuk melakukan kekerasan dan pembunuhan. Mereka yang menentang kekuasaan sama saja dengan mempertaruhkan jiwanya.
- Apakah tersedia uang yang cukup untuk mengajukan tuntutan hukum? Biaya peradilan, biaya pengacara, perjalanan internasional, panggilan telepon, mengumpulkan bukti, dan biaya-biaya lainnya akan membengkak dengan cepat.
- Apakah Anda mampu bekerja selama bertahun-tahun untuk menjalani proses penuntutan? Sebuah tuntutan hukum bisa makan waktu selama 3 s/d 10 tahun atau bahkan lebih. Terkadang, korban-korbannya sudah meninggal dunia sebelum kasus tersebut diselesaikan.

## Memanfaatkan Hukum Internasional

Banyak hukum dan konvensi yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB (hampir setiap negara di dunia) melindungi lingkungan hidup bagi setiap orang. Hak asasi manusia adalah milik setiap orang dan komunitas dan tidak bisa dirampas. Hak-hak tersebut diakui secara internasional, tetapi agar hak-hak tersebut efektif, masyarakat harus memahaminya dan menjalankannya. Tanpa ada tindakan yang memastikan hak-hak tersebut ditegakkan di tingkat nasional, maka hukum-hukum dan konvensi internasional tidak akan efektif.



### Kesepakatan-kesepakatan internasional

Banyak kesepakatan internasional yang memberikan perlindungan pada hak asasi manusia dan lingkungan. Sayangnya, seseorang atau suatu kelompok biasanya tidak mencatatkan sebuah keberatan ketika kesepakatan-kesepakatan tersebut dilanggar. Hanya negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut (*State Party*) yang dapat mengajukan keberatan, dan negara-negara ini jarang melakukannya. Dan kesepakatan-kesepakatan ini hanya dapat ditegakkan bagi pemerintah, tidak untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Di banyak negara, hukum-hukum internasional dapat digunakan di pengadilan dalam negeri. Mempelajari apa yang termuat dalam kesepakatan-kesepakatan internasional juga bisa membantu Anda memahami sikap komunitas internasional pada isu-isu tertentu, dan membantu membangun kampanye untuk melindungi hak asasi manusia.

Jika masyarakat tahu hak-hak mereka dan memahami kesepakatan-kesepakatan yang dibuat banyak negara untuk menghormati hak-hak tersebut, mereka akan lebih mampu menjalankan hak-haknya sekaligus menuntut pemerintah untuk lebih bertanggung jawab.

Dibawah ini adalah daftar beberapa kesepakatan internasional yang memberikan perlindungan pada hak asasi manusia dan lingkungan, berikut website di mana Anda bisa mendapatkan dokumen-dokumen kesepakatan tersebut dan informasi menyangkut bagaimana dokumen tersebut digunakan (Lihat halaman 467 untuk mendapatkan penjelasan tentang beberapa kesepakatan tentang bahan beracun).

**The United Nations Charter**

[www.un.org/aboutun/charter/](http://www.un.org/aboutun/charter/)

**The Universal Declaration of Human Rights**

[www.un.org/Overview/rights.html](http://www.un.org/Overview/rights.html)

**The Convention on the Rights of the Child**

[www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm)

[www.unicef.org/crc/](http://www.unicef.org/crc/)

**The United Nations Framework Convention on Climate Change**

[unfccc.int/2860.php](http://unfccc.int/2860.php)

**The Convention on Biological Diversity**

[www.biodiv.org/default.shtml](http://www.biodiv.org/default.shtml)

[www.iisd.ca/biodiv/cbdintro.html](http://www.iisd.ca/biodiv/cbdintro.html)

**The Declaration on the Right to Development**

[www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm)

**The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights**

[www.unhchr.ch/html/menu3/b/a\\_ceschr.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ceschr.htm)

**The United Nations Declaration on Social Progress and Development**

[www.unhchr.ch/html/menu3/b/m\\_progre.htm](http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_progre.htm)

**The United Nations Vancouver Declaration on Human Settlements**

[www.un-documents.net/van-dec.htm](http://www.un-documents.net/van-dec.htm)

**The Stockholm Convention on the Elimination of POPs**

[www.pops.int](http://www.pops.int)

[www.ipen.org](http://www.ipen.org)

**The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous**

**Wastes and Their Disposal**

[www.basel.int/text/con-e.htm](http://www.basel.int/text/con-e.htm)

[www.ban.org](http://www.ban.org)

**The Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes within Africa**

[www.londonconvention.org/Bamako.htm](http://www.londonconvention.org/Bamako.htm)

[www.ban.org/Library/bamako\\_treaty.htm](http://www.ban.org/Library/bamako_treaty.htm)

**The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent (PIC) Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade**

[www.pic.int/](http://www.pic.int/)

**The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter**

[www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic\\_id=258&doc\\_id=681](http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=258&doc_id=681)

[www.londonconvention.org](http://www.londonconvention.org)

**The Dublin Statement on Water and Sustainable Development**

[www.wmo.ch/web/homs/documents/english/icwedece.html](http://www.wmo.ch/web/homs/documents/english/icwedece.html)

**The Millennium Declaration of Johannesburg**

[www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit\\_docs/political\\_declaration\\_final.pdf](http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/political_declaration_final.pdf)

[www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit\\_docs/political\\_declaration\\_final.pdf](http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/political_declaration_final.pdf)

## Forum-forum internasional dan prosedur-prosedur khusus

Untuk menarik perhatian pada perjuangan mereka atas hak asasi manusia, masyarakat di banyak negara berupaya mencari keadilan dari forum-forum internasional seperti *Organization of American States Inter-American Court*, Pengadilan Internasional, Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Perhatian internasional dari forum-forum seperti ini dapat memberi tekanan pada negara-negara untuk menegosiasikan penyelesaian atau mengakhiri aktivitas perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Mungkin perlu juga menunjukkan bahwa membawa persoalan ke pengadilan dalam negeri di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia ternyata tidak menghasilkan solusi, atau menjelaskan mengapa hukum-hukum (perundang-undangan) nasional dan sistem peradilan dalam negeri tidak adil atau mungkin tidak akan berhasil karena satu dan lain alasan.

PBB juga telah menyusun “prosedur-prosedur khusus” untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Prosedur-prosedur khusus ini bisa dipergunakan oleh kelompok atau perorangan tanpa perlu meminta persetujuan pemerintah, dan tidak bergantung pada suatu perundang-undangan atau konvensi.

Setiap orang atau komunitas dapat mempergunakan prosedur-prosedur khusus tersebut dengan menghubungi para pakar HAM yang dinamakan “*Special Rapporteurs*.” Orang-orang ini menyelidiki setiap pelanggaran HAM yang terjadi dalam kawasan kerja mereka (yang dinamakan “mandat”), seperti hak atas makanan, hak atas kesehatan, pembuangan limbah beracun, dan sebagainya. *Special Rapporteur* ini bisa dihubungi dengan sebuah surat sederhana, yang memuat laporan-laporan berita, dokumen-dokumen, atau informasi tertulis lain tentang persoalan yang terjadi. Selanjutnya, *Rapporteur* akan melaporkan problem-problem ini ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan terkadang ke Majelis Umum PBB.

Nama-nama *Rapporteur*, mandat-mandatnyanya, dan informasi kontaknyanya dapat dilihat pada website HAM PBB ([www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)), di bawah “Human Rights by Issue.”

